

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN  
TRADISIONAL JAMU**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SHANIA MEDSKY KUSUMAPUTRI**

**C100160119**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN  
TRADISIONAL JAMU NGUTER**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SHANIA MEDSKY KUSUMAPUTRI**  
**C100160119**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen**

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Inayah'.

**(Inayah, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN**  
**TRADISIONAL JAMU**

**OLEH**  
**SHANIA MEDSKY KUSUMAPUTRI**  
**C100160119**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 18 Januari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Dekan,



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 18 Januari 2021

Penulis



**SHANIA MEDSKY K.**

**C100160119**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL JAMU**

### **Abstrak**

Pengetahuan tentang obat dan pengobatan atau yang disebut dengan Jamu merupakan salah satu bidang terpenting dari Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan ini dimiliki hampir oleh semua masyarakat asli dan komunitas lokal dan merupakan bagian dari hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hampir semua masyarakat asli telah mengembangkan tumbuhan untuk berbagai kepentingan dan salah satu fungsi yang terpenting dari tumbuhan itu adalah untuk keperluan pengobatan. Masyarakat lokal di Indonesia sudah berabad-abad menggunakan keanekaragaman hayati sebagai ramuan untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan. Permasalahan dalam pembahasan ini yaitu apakah informasi-informasi pada Jamu telah dilindungi hak-hak masyarakat adatnya atas Pengetahuan Tradisional oleh pemerintah, sehingga penulis tertarik untuk membahas ini. Penelitian ini membahas mengenai landasan hukum yang digunakan untuk melindungi pengetahuan, apa upaya pemerintah dalam melindungi pengetahuan jamu di Indonesia dan bagaimana konsep perlindungan hukum pengetahuan tradisional jamu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pengetahuan tradisional serta menganalisa peraturan hukum positifnya. Metode penelitian ini digunakan peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Tradisional pada Jamu ini perlu dilindungi sesuai dengan konsep perlindungan Graham Dutfield yang sejalan dengan model perlindungan yang dikembangkan WIPO, yaitu dengan cara perlindungan defensif dan perlindungan positif.

**Kata kunci:** pengetahuan tradisional, perlindungan hukum, jamu

### **Abstract**

Knowledge about medicine and medicination or what is called Jamu is one of the most important areas of Traditional Knowledge. This knowledge is owned by almost all indigenous peoples and local communities. Most of all indigenous people have developed plants for various purposes and one of the most important functions of these plants is for medicinal purposes. Local people in Indonesia have used biodiversity for centuries as an ingredient to treat disease and maintain health. The problem in this discussion is whether the information on Jamu has protected the rights of indigenous peoples to Traditional Knowledge by the government, so that the author is interested to discuss this. This research discusses the legal basis used to protect knowledge, what is the government's efforts to protect the knowledge of herbal medicine in Indonesia and how the concept of legal protection of traditional herbal medicine knowledge. The purpose of this study is to determine the legal protection of traditional knowledge and to analyze its positive legal regulations. This research method used by researchers is a normative juridical approach. The results of the research conducted by the author in this thesis can be concluded that the Traditional Protection of Jamu needs to be protected in accordance with the Graham Dutfield protection concept that goes

with the protection model developed by WIPO, by means of defensive protection and positive protection.

**Keywords:** traditional knowledge, legal protection, herb

## **1. PENDAHULUAN**

Pengetahuan tradisional merupakan hasil dari kreasi dan pemikiran manusia baik berupa lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hal ini sesuai dengan maksud kata Ciptaan yang ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), sehingga dengan demikian pada dasarnya pengetahuan tradisional dapat juga disebut sebagai HKI. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional termasuk bidang obat-obatan, muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai penemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka World Intellectual Property Organization (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan tradisional tersebut. Indonesia sebagai Negara peserta CBD dan anggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang dapat melindungi pengetahuan tradisional. Indonesia sebenarnya telah membuat RUU mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT&EBT) namun masih juga belum disahkan. Masih banyak perdebatan dan koreksi dari berbagai pihak yang menuai bertambah banyaknya eksploitasi PT&EBT dari Indonesia oleh negara-negara maju. Adanya unsur keharusan pendaftaran bagi karya HAKI agar mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya menurut Bill Morrow bagi negara negara dikalangan Asia dipandang menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum Asia yang lebih tampak bercorak komunal (Absori, 2010).

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak kekayaan intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology* (Yusuf dan Hasima, 2018). Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan (Syiblunnur, Absori, dan, Wujoso, 2017).

Sebagai salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dewasa ini adalah sejauh mana pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) Jamu ini mendapat perlindungan. Menurut Absori, manusia merupakan miniatur universum, sedangkan alam merupakan salah satu objek untuk menggali pengetahuan, menggali kebesaran Tuhan, dan pada akhirnya akan meningkatkan keimanan seseorang (Absori, Dimyati, dan Ridwan, 2017). Disamping itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang menghormati hak-hak warga (Absori, 2005).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memaparkan rumusan masalah yaitu, sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana landasan hukum yang digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional?. *Kedua*, Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi pengetahuan tradisional jamu di Indonesia?. *Ketiga*, Bagaimanakah konsep perlindungan hukum pengetahuan tradisional jamu?.

Karena peliknya masalah ini dan mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini, maka penulis menganalisis secara mendalam dan hati-hati mengenai perlindungan hukum pengetahuan tradisional pada Jamu, yang hasilnya penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu ”**.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Jadi, metode ini melakukan penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum yang biasanya disebut bahan kepustakaan dengan cara, mempelajari bahan-bahan seperti Peraturan Perundang-undangan, putusan lembaga pengadilan (yurisprudensi), kasus hukum, dan doktrin (Qamar, 2017).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Landasan Hukum yang Digunakan untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional**

Pada negara-negara penghasil sumber kekayaan alam dalam praktiknya menggunakan instrumen hukum yang berbeda-beda untuk melindungi pengetahuan tradisional, khususnya pada pengetahuan obat. Hal ini disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masing-masing negara (Dulay, 2011). Terdapat tiga pola yang digunakan negara-negara dalam pengaturan Pengetahuan Tradisional. Pertama yaitu perlindungan pengetahuan tradisional diatur dalam undang-undang perlindungan masyarakat asli, kedua yaitu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan bagian dari pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga yaitu perlindungan pengetahuan obat diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri (Dulay, 2017). Maka dalam membuat suatu peraturan diperlukan suatu acuan atau landasan agar jelas objek dan tujuan apa saja yang akan diatur didalamnya.

Terdapat berbagai-macam tujuan yang ingin dicapai negara-negara dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional. Tujuan ini biasanya tertulis pada peraturan undang-undang yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Secara umum terdapat empat kelompok tujuan yang ingin dicapai dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional, yaitu (i) pelestarian atau konservasi pengetahuan tradisional; (ii) peningkatan inovasi; (iii) pembagian keuntungan yang patut dan adil; dan (iv) pembangunan yang berkelanjutan (Dulay, 2017).



Perlindungan sebuah karya erat kaitannya dengan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Rezim HKI atau sistem HKI yang berlaku tidak lepas peranan WTO (*World Trade Organization*) melalui lampiran utamanya yaitu TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994. Keberadaan perjanjian TRIPs mampu menjembatani perbedaan pengaturan HKI di berbagai Negara. Perjanjian TRIPs memberikan standar ketentuan minimum bagi perlindungan HKI yang harus dipatuhi oleh seluruh Negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Perjanjian TRIPs tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 1995.

Selanjutnya terdapat *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD) merupakan hasil dari suatu perjanjian internasional WIPO yang dikelola oleh Komisi PBB. CBD dikembangkan oleh *United Nation Environment Programs*, yang kemudian diadopsi pada bulan Juni 1992 dalam *The United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, yang umumnya dikenal sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*), dan diratifikasi pada bulan Desember 1993.

Pada Pembukaan CBD telah secara eksplisit menyatakan pengakuan akan adanya hubungan yang sangat dekat dan adanya ketergantungan secara tradisi antara masyarakat tradisional dan keanekaragaman hayati. Pembukaan CBD ini juga mengakui adanya keinginan untuk dilaksanakannya pembagian manfaat yang adil dari penggunaan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek yang berkaitan erat dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan kelestarian penggunaan dari komponen-komponennya.

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, Pasal 8(j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konverensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati menjelaskan tiga kewajiban yang berbeda untuk para pihak yang terlibat, yang menyatakan bahwa para pihak tersebut harus: menghormati, melindungi dan menjaga pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek dari komunitas asli dan lokal; mendorong penggunaan yang lebih luas dari pengetahuan ini, pengetahuan ini, dan praktek-praktek ini dengan

persetujuan dan keterlibatan dari pemegang pengetahuan ini; dan mendorong pembagian manfaat yang adil yang muncul dari penggunaan pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek semacam ini.

*Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD) ini menjadi kerangka hukum pada akses dan pembagian keuntungan yang digunakan dalam perlindungan pengetahuan tradisional pada umumnya dan pengetahuan obat pada khususnya.

Dalam pembuatan jamu terdapat konsep-konsep dan ciri khas yang diperhatikan sebelum pembuatannya, dan Jamu memiliki karakteristik warisan tradisional turun temurun yang berasal dari nenek moyang. Hal ini sesuai dengan pengertian Pengetahuan Tradisional pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Jamu merupakan bagian dari hak komunal Pengetahuan Tradisional pada sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Dutfield, mengelompokkan alasan-alasan yang menjadi dasar pengakuan terhadap pengetahuan tradisional tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu alasan (i) moral (*moral reason*), (ii) hukum (*law reason*), dan (iii) kemanfaatan (*utilitarian reason*). Menurutnya, berdasarkan ketiga alasan ini, suatu pemerintah sebenarnya sudah mempunyai landasan yang cukup kuat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengetahuan secara hukum.

### **3.2. Upaya Pemerintah dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Jamu di Indonesia**

Upaya pemerintah dalam melindungi Pengetahuan Tradisional ini sesuai dengan konsep perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional sebagaimana diuraikan oleh Dutfield sejalan dengan model perlindungan yang dikembangkan oleh WIPO. Secara umum WIPO menjelaskan dua model perlindungan, yaitu (Sofyarto, 2018):

*Defensive protection* merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI atas Pengetahuan Tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik Pengetahuan Tradisional. Bentuk asas perlindungan defensif dari perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah berupa tindakan yang menjamin bahwa hak atas pengetahuan tradisional tidak diberikan kepada pihak lain selain

pemegang hak pengetahuan tradisional adalah adat sebagai pemiliknya (*the customary traditional knowledge*). Pemilikan atas pengetahuan tradisional dari masyarakat tidak dalam pengertian *ownership*, melainkan *custodianship* (perwakilan) (Sardjono, 2010). Sistem defensif harus didukung dengan adanya *database* yang akurat dan *updated*, yang memuat informasi mengenai pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang dimaksud.

Perlindungan defensif dapat juga disebut perlindungan non-hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang sifatnya tidak mengikat. Saat ini terdapat *database* resmi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang menyimpan informasi mengenai obat-obatan pengetahuan tradisional di Indonesia, yaitu <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

*Positive protection* dapat dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum, yaitu dengan mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait HKI atau melalui pembentukan undang-undang khusus. Indonesia telah menyusun peraturan perundang-undangan terhadap Pengetahuan Tradisional dan *folklore*. Usaha tersebut telah mencapai pada tahap RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan PT dan EBT. Ruang lingkup subjek yang dilindungi dalam RUU ini yaitu (i) Pengetahuan Tradisional; dan (ii) ekspresi budaya tradisional.

Pada RUU ini mengatur segala keperluan perlindungan serta pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Jangka waktu perlindungan pun diberikan selama masih dipelihara oleh Kustodiannya. Hal ini merupakan tujuan agar menjaga kelestariannya dari kepunahan juga termasuk pengembangan sejauh pengembangan itu tidak terlalu menyimpang dari keaslian PT-EBT tersebut. Masyarakat asing pun turut dapat menggunakan pemanfaatan ini tetapi wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan. Namun tidak semua orang asing dapat memiliki izin akses tersebut, permohonan izin akses dapatlah ditolak apabila: a) Pemanfaatan bertentangan dengan peraturan; b) Pemanfaatan menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar pada

masyarakat terkait; dan c) objek yang dimohonkan bukan lingkup Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.

Namun hingga saat ini peraturan perundang-undangan ini tidaklah kunjung selesai. Dengan demikian belum ada hukum positif yang benar-benar menjadi acuan dalam melindungi Pengetahuan Tradisional Jamu.

### **3.3. Konsep Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Jamu**

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum untuk mencegah suatu pemanfaatan tanpa izin pemanfaatan ini telah dituangkan dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan didalamnya telah tertulis lingkup apa saja yang harus dilindungi agar tidak terjadinya pemanfaatan tanpa izin.

Perlindungan hukum dalam rangka pencegahan terjadinya sengketa yaitu dengan cara dilakukannya pendataan dan perdokumentasian oleh Menteri maupun Lembaga yang berkepentingan dan hal ini hak Kustodian yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat diinventarisasi dan tercatat pada website yang telah disediakan oleh Menteri Hukum dan HAM Dirjen HAKI. Perlindungan hukum untuk mencegah suatu pemanfaatan tanpa izin pemanfaatan ini telah dituangkan dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan didalamnya telah tertulis lingkup apa saja yang harus dilindungi agar tidak terjadinya pemanfaatan tanpa izin. Ruang lingkup perlindungan ini meliputi pencegahan dan/atau pelarangan, yaitu a) pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing; b) dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional; c) dan pemanfaatan yang dilakukan dengan cara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait.

Untuk menyeimbangkan peran pemerintah yang sedemikian tadi perlu kontrol dari masyarakat. Namun, kontrol saja belum menjamin bahwa peran pemerintah yang begitu sentral tadi dapat diseimbangkan pada posisi yang

proporsional karena kontrol itu sendiri hanya bersifat pengawasan saja tanpa memberikan kontribusi yang lebih dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan peran tadi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundangundangan di negara kita (Absori dan Muin, 2016).

Masyarakat adat perlu paham akan adanya perlindungan pengetahuan tradisional pada jamu yang telah turun menurun dan diajarkan oleh nenek moyang sehingga tidak ada celah bagi pihak lain untuk melakukan pemanfaatan tanpa izin. Dalam hal ini Perlindungan hukum secara preventif terhadap pengetahuan tradisional jamu ini diperlukan karena banyak produksi jamu yang telah dilakukan penjualan ke berbagai pulau di Indonesia bahkan hingga Luar Negeri sehingga menghindari adanya praktek curang oleh pihak lain.

Perlindungan Hukum yang bersifat represif lebih bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan. Apabila terdapat pemanfaatan tanpa izin akses, sengketa dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa kepemilikan, sengketa bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat kerusakan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Profetik. Kusodian Pengetahuan Tradisional dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain dengan cara a) gugatan ganti rugi, dan/atau b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan harus diajukan ke pengadilan negeri setempat. Penyelesaian diluar pengadilan ini dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1. Kesimpulan**

Terdapat dua perjanjian internasional yang Indonesia sendiri merupakan anggota dari organisasi tersebut, yaitu perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yang berada pada lampiran utama WTO (*World Trade Organization*) dan *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD) merupakan hasil dari suatu perjanjian internasional WIPO yang dikelola oleh

Komisi PBB. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, Pasal 8(j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati menjelaskan tiga kewajiban untuk melindungi inovasi dari komunitas asli dan lokal; mendorong penggunaan yang lebih luas dari pengetahuan ini; dan mendorong pembagian manfaat dari penggunaan pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek semacam ini. Landasan pemerintah untuk mengambil langkah untuk melindungi pengetahuan tradisional secara hukum ini sejalan dengan pendapat Dutfield yaitu pengelompokan alasan yang menjadi dasar pengakuan terhadap pengetahuan tradisional tersebut menjadi tiga, yaitu alasan moral, alasan hukum, dan alasan kemanfaatan. Dari pendapat Dutfield ini setidaknya terdapat tiga model perlindungan yang dapat dikembangkan yaitu hukum adat, kontrak, dan hukum hak kekayaan intelektual.

Terdapat 2 model perlindungan Pengetahuan Tradisional yang dikembangkan oleh WIPO. Yaitu perlindungan defensif dan perlindungan positif. Perlindungan defensif yaitu perlindungan yang menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HKI atas *traditional knowledge* tersebut. Perlindungan secara defensif ini dilakukan dengan cara membuat sebuah inventarisasi berupa *database*. Indonesia sendiri memiliki *database* yang berisikan informasi-informasi mengenai data kekayaan intelektual komunal. Berdasarkan Permenkuham Nomor 13 Tahun 2017, sebuah website resmi dari pemerintah yang bernama <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> ini dikerahkan menyimpan informasi mengenai obat-obatan pengetahuan tradisional di Indonesia.

Sedangkan perlindungan positif ini dilakukan melalui sarana hukum HKI dan hukum kontrak. Pemerintah telah berupaya untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Upaya ini telah mencapai pada tahap Rancangan Undang-Undang. Pada rancangan undang-undang ini membahas mulai dari jangka waktu perlindungan, izin akses pemanfaatan, penolakan izin akses, dan lain sebagainya.

Namun peraturan perundang-undangan ini tidaklah kunjung selesai hingga saat ini. Dengan demikian belum ada hukum positif yang benar-benar menjadi acuan dalam melindungi Pengetahuan Tradisional Jamu.

Pada perlindungan preventif ini dilakukan dengan cara dituangkan dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan didalamnya telah tertulis lingkup apa saja yang harus dilindungi agar tidak terjadinya pemanfaatan tanpa izin, dan dengan cara pendataan dan pendokumentasian oleh Menteri atau Lembaga yang berkepentingan. Maka dari itu hak Kustodian yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat diinventarisasi dan tercatat pada website yang telah disediakan oleh Menteri Hukum dan HAM Dirjen HAKI. Sedangkan perlindungan represif ini telah tertulis di dalam Rancangan Undang-Undang yaitu dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa baik didalam pengadilan yaitu dengan ganti rugi dan pemberhentian kegiatan pemanfaatan. Dan diluar pengadilan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase.

#### **4.2.Saran**

Indonesia sebagai anggota dari organisasi Internasional yang telah memiliki perjanjian internasional yang jelas untuk melindungi hak kekayaan intelektual terutama di bidang keanekaragaman hayati sebaiknya mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya guna melindungi keanekaragaman hayati yang berasal dari Indonesia agar hak-hak masyarakat asli dapat dilindungi serta pihak asing dapat mempergunakan secara bijak dengan cara pemanfaatan.

Secara Defensif, dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional ini, seharusnya masyarakat perlu untuk mencari tahu bahwa Pengetahuan Tradisional Jamu ini perlu dilindungi, dan dengan adanya *database* inilah yang akan membantu dalam penginventarisasian dalam hal Kekayaan Intelektual Komunal agar tidak terjadi pemanfaatan oleh pihak ketiga tanpa adanya pembagian keuntungan. Secara Positif, Pemerintah seharusnya segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional agar perlindungan terhadap Hak Komunal ini jelas terjaga dan tidak akan ditiru ataupun di klaim oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, dan Muin, Fatkhul. (2016).. “*Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*”, Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM)
- Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan Ridwan. (2017). “*Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*”, Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017
- Absori. (2005). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*: Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 2 No 1.
- Absori. (2010). “*Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*”, Muhammadiyah University Press
- Asri, Dyah Permata Budi. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1.*
- Dulay, Zainul. (2011). *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qamar, Nurul. Dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar, CV. Social Politic Genius.
- RUU PT-EBT
- Sardjono, Agus. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni.
- Sofyarto, Karlina. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*, Semarang: Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.20, No. 1, pp. 149-162.
- Syiblunnur, Muhammad Absori, dan, Wujoso, Hari. (2017). *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *WTO Agreement*
- Yusuf, Haris dan Hasima, Rahman. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau. Halu Oleo Law, Volume 2 Issue 1, March 2018.*